

Analisis Kerja Sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan

Asep Setiawan^{*1}, Usni², Surwandono³, Dina Meidiana⁴, Mansyur Syakban⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Tangles, Banten, Indonesia

e-mail: ^{*1}asep.setiawan@umj.ac.id, ²usni@umj.ac.id, ³surwandono@umy.ac.id,
⁴dinar.mediana@staff.umj.ac.id, ⁵syahrul@yahoo.co.id

Abstract

This study analyses international cooperation, both bilateral and multilateral, in the establishment of Indonesia's new capital, Ibu Kota Nusantara (IKN). The study utilizes the theoretical frameworks of international collaboration and national interest to examine the dynamics that underpin these partnerships. A qualitative research methodology was employed, using data obtained from literature reviews and interviews. The results indicate three key insights. Initially, worldwide collaboration in the IKN project constitutes a commitment combining governmental bodies, the corporate sector, and global institutions. These interactions can be classified into form of bilateral and multilateral kinds of collaboration. Secondly, Indonesia's collaboration with partners from Asia and Europe focus two major areas: infrastructural development and ecologically sustainable practices. Asian nations have a robust interest in infrastructure projects, whilst European partners emphasize environmentally sustainable initiatives in the development of the new capital. Third, notwithstanding their participation in IKN, the economic and political objectives of Indonesia's partners from both Asia and Europe seem to transcend the initiative. Their main interest is to improve political and economic relations with Indonesia, frequently emphasizing investments in sectors like mining and infrastructure beyond the Kalimantan region. This study enhances the academic discourse regarding the patterns and modalities of international cooperation in Indonesia, providing insights into the strategic motivations of Indonesia's worldwide partners concerning the IKN project.

Keywords — *Bilateral, Cooperation, International, Multilateral, National interest, New capital city*

Abstrak

Studi ini menganalisis kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral, dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN). Studi ini menggunakan kerangka teori kerja sama internasional dan kepentingan nasional untuk melihat dinamika yang melandasi kemitraan tersebut. Metodologi penelitian kualitatif digunakan, dengan memakai data yang diperoleh dari tinjauan literatur dan wawancara. Hasilnya menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, kerja sama di seluruh dunia dalam proyek IKN merupakan sebuah bentuk komitmen yang menggabungkan badan-badan pemerintah, sektor korporasi, dan lembaga-lembaga global. Interaksi ini dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral. Kedua, kerja sama Indonesia dengan mitra dari Asia dan Eropa berfokus pada dua bidang utama: pembangunan infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan. Negara-negara Asia memiliki ketertarikan yang besar terhadap proyek-proyek infrastruktur, sementara mitra-mitra dari Eropa menekankan pada inisiatif-inisiatif ramah lingkungan dalam pembangunan ibu kota baru. Ketiga, terlepas dari partisipasi mereka dalam IKN, tujuan ekonomi dan politik dari mitra Indonesia baik dari Asia maupun Eropa tampaknya melampaui inisiatif untuk kerja sama tersebut. Kepentingan nasional mereka adalah untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan Indonesia, yang sering kali menekankan investasi di sektor-sektor seperti pertambangan dan infrastruktur di luar wilayah Kalimantan. Studi ini meningkatkan

diskusi akademis mengenai pola dan modalitas kerja sama internasional di Indonesia, memberikan wawasan tentang motivasi strategis mitra Indonesia di seluruh dunia terkait proyek IKN.

Kata kunci — Bilateral, Ibu kota baru, Internasional, Kepentingan nasional, Kerjasama, Multilateral

1. Pendahuluan

Pembangunan ibu kota baru merupakan proyek raksasa yang memerlukan energi besar sebuah bangsa. Ibu kota dapat disebut sebagai cermin terdepan dari sebuah negara (Rossman, V. , 2018). Oleh karena pemindahan ibu kota seperti terjadi di Indonesia tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyangkut landasan kuat filosofis dibalik pemindahan itu termasuk konsekuensi masa depan.

Membangun ibu kota baru juga memerlukan kerja sama internasional karena tidak semua modal dan perangkat teknologi di dalam negeri dapat menyelesaikan pembangunan itu secara efektif. Kerja sama internasional ini menjadi salah satu aspek penting antara lain karena perlunya bantuan finansial dalam membangun ibu kota baru. Mitra kerja sama Indonesia yang potensial dalam membangun IKN ini adalah negara-negara di Asia dan Eropa. China misalnya memiliki modal cukup besar untuk membantu pembangunan IKN.

Selain itu kerja sama internasional diperlukan ketika Indonesia membutuhkan teknologi canggih dalam membangun kota masa depan termasuk didalamnya dalam membangun infrastruktur ibu kota seperti transportasi dan teknologi yang ramah lingkungan. Selain membutuhkan modal besar, pembangunan IKN juga sesuai dengan misinya ramah lingkungan maka diperlukan teknologi dan keahlian yang dapat diperoleh biasanya dari negara-negara Eropa. Pemindahan ibu kota memiliki implikasi

kepada negara tetangga Indonesia (Zulkifli, Yasid, Rahman, Hussin, 2022).

Dari data yang dirilis diperkirakan IKN dibangun dari tahun 2022 sampai 2045 dimana Indonesia memerlukan dana mencapai Rp 466 Triliun (Farisa, 2022). Angka ini didasarkan kepada perhitungan perencanaan yang dapat saja aktualnya akan membengkak.

Berbagai studi mengenai pembangunan IKN banyak menaruh perhatian kepada landasan hukum dari pemindahan ibu kota ini. Selain itu sebagian kajian juga memberi perhatian masalah infrastruktur. Penelitian mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah banyak dilakukan yang juga menyangkut kerja sama internasional.

Pertama, Adinugroho, A. (2021) mengkaji potensi peran kemitraan internasional dalam keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Artikel tersebut memberikan analisis kritis tentang faktor-faktor yang mendorong relokasi ibu kota Indonesia dan membahas potensi keuntungan dan kerugian bermitra dengan organisasi internasional dan pemerintah asing dalam pengembangan ibu kota baru. Adinugroho berpendapat bahwa bermitra dengan organisasi internasional dan pemerintah asing dapat memberikan Indonesia akses ke keahlian, teknologi, dan pendanaan yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Kemitraan internasional juga dapat membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, yang merupakan

pertimbangan penting dalam pembangunan ibu kota baru.

Kedua, Adi Prasetyo (2021) membahas peran lembaga keuangan internasional (IFI) dalam pemindahan ibu kota Indonesia. Artikel ini mengkaji pendanaan dan bantuan teknis yang diberikan oleh IFI, dan menganalisis potensi manfaat dan kelemahan keterlibatan IFI. Artikel ini juga mengusulkan serangkaian strategi untuk mempromosikan keterlibatan IFI yang efektif dalam konteks relokasi. Sebagai kesimpulan, artikel tersebut menyoroti peran penting yang dapat dimainkan oleh lembaga keuangan internasional (IFI) dalam mendukung relokasi ibu kota Indonesia. Artikel tersebut mencatat bahwa IFI telah berperan penting dalam memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung pengembangan ibu kota baru.

Ketiga, Dwi Larso (2022) mengeksplorasi potensi kerja sama Selatan-Selatan dalam rangka relokasi ibu kota Indonesia. Artikel tersebut berpendapat bahwa relokasi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara berkembang lainnya dan mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Artikel ini membahas potensi manfaat dan tantangan kerja sama Selatan-Selatan, dan mengusulkan serangkaian strategi untuk mempromosikan kolaborasi yang efektif. Artikel ini menekankan pentingnya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, dan menyoroti potensi peran organisasi regional dalam memfasilitasi kerja sama Selatan-Selatan.

Keempat, Dian Permata Sari (2021) mengkaji tantangan dan peluang yang terkait dengan kolaborasi internasional dalam relokasi ibu kota Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi potensi manfaat kolaborasi internasional, termasuk peningkatan akses ke sumber daya

dan keahlian, dan membahas potensi tantangan, seperti kekhawatiran atas kedaulatan nasional dan potensi konflik kepentingan. Artikel ini juga mengusulkan serangkaian strategi untuk mempromosikan kolaborasi internasional yang efektif dalam konteks relokasi. Strategi ini termasuk perlunya komunikasi yang jelas dan mekanisme tata kelola yang transparan, pengembangan rasa saling percaya dan rasa hormat antara pemangku kepentingan, dan pentingnya keterlibatan dan partisipasi pemangku kepentingan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini mengkaji kebijakan untuk bekerja sama dengan negara dan lembaga di Asia dan Eropa mulai dari bentuk, fokus dan kepentingan nasional pihak yang bekerjasama. Jadi *state of the art* penelitian ini bagaimana bentuk, fokus dan kepentingan asing dalam kerja sama membangun IKN. Rumusan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana bentuk, fokus dan kepentingan kerja sama Indonesia dengan Asia dan Eropa dalam membangun IKN?

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan analisis kerja sama internasional dalam membangun IKN ini digunakan sejumlah teori terkait dengan kerja samainternasional. Menurut K.J Holsti (1998) kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai a) pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; b) pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilainilainya; c) persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau

benturan kepentingan; d) pengaturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; e) transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Holsti menekankan bahwa kerja sama internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perjanjian dan kesepakatan formal hingga jaringan dan koalisi informal. Kerja sama internasional juga dapat terjadi di berbagai tingkat, seperti tingkat bilateral, regional, atau global. Holsti mencatat bahwa keberhasilan kerja sama internasional bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan para aktor yang terlibat, distribusi kekuasaan dan sumber daya, serta efektivitas institusi internasional.

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff (2019) kerja samadapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerja samamelalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Selanjutnya Dougherty dan Pfaltzgraff (2019) menekankan bahwa kerja sama internasional difasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional, yang menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan tindakan mereka. Lembaga-lembaga ini dapat bersifat regional, seperti Uni Eropa, atau global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga-lembaga internasional menetapkan aturan, norma, dan prosedur yang mendorong kerja

sama, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian.

Sedangkan Baylis, Smith, dan Owens (2017: 455) berpendapat kerja sama internasional mengacu pada "tindakan negara-negara yang bekerja sama, melalui berbagai pengaturan kelembagaan, untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan". Definisi ini menyoroti peran negara sebagai aktor utama dalam kerja sama internasional dan menekankan pentingnya kerangka kerja kelembagaan untuk memfasilitasi kerja sama.

Goldstein, Pevehouse, dan Cook (2020) mendefinisikan kerja sama internasional sebagai "tindakan dua atau lebih negara atau aktor lain yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan". Definisi ini memperluas cakupan aktor yang terlibat dalam kerja sama internasional dengan memasukkan aktor non-negara dan menekankan peran tujuan bersama dalam mendorong kerja sama.

Berdasarkan analisisnya tentang tata kelola global, Held (2019) mendefinisikan kerja sama internasional sebagai "proses negosiasi, penetapan, dan penerapan norma dan aturan yang memfasilitasi tindakan kolektif di antara negara dan aktor lainnya". Definisi ini menyoroti peran norma dan aturan dalam membentuk perilaku para aktor dan menekankan perlunya mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong kerja sama.

Menurut Holsti (1992) terdapat beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja samadengan negara melakukan kerja samadengan negara lainnya: 1) dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerja samadengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut; 2) untuk meningkatkan efisiensi yang

berkaitan dengan pengurangan biaya. 3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. 4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa kerja sama internasional terbagi dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut: 1) kerja sama bilateral merupakan kerja sama atau perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh dua negara saja untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak; 2) kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam satu kawasan; 3) Kerja sama multilateral merupakan perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di luar batasan dari suatu kawasan tertentu.

Mengenai kerja sama internasional ini, Kartasasmita (1997) menyebutkan didorong oleh beberapa faktor: 1) kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya; 2) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa; 3) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerja sama internasional; 4) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerja sama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Mengenai apa yang diperoleh dari kerjasama, Perwita dan Yani (2019) menyatakan bahwa isu utama dalam kerja sama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja samatersebut dapat

mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerja sama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kerja sama terjadi apabila ada dua negara/pemerintah/lembaga atau lebih memiliki kesamaan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Kesamaan kepentingan itu dapat terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bahkan pertahanan.

Menurut Teuku May Rudy (2002) dalam membentuk sebuah kerja sama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Selanjutnya menurut Kishan S. Rana (2011) dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara.

Dari penjelasan itu dapat disebutkan ada beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerja sama internasional. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktoraktor ekonomi dan masyarakat sipil. Kedua, kerja sama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi

juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

Sementara itu kepentingan nasional adalah konsep yang sangat penting dalam studi hubungan internasional, yang mewujudkan tujuan dan aspirasi fundamental yang memandu kebijakan luar negeri suatu negara. Secara luas, konsep ini mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain, yang mencakup bidang-bidang seperti keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan proyeksi nilai-nilai budaya atau ideologi (Morgenthau, 1973). Kepentingan nasional berfungsi sebagai kompas bagi para pembuat kebijakan, membantu mengarahkan kompleksitas hubungan internasional dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan (Waltz, 1979).

Makna kepentingan nasional dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori: kepentingan inti (atau vital) dan kepentingan pinggiran (Nye, 2003). Kepentingan inti sering kali berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara, seperti pertahanan dan integritas teritorial. Di sisi lain, kepentingan pinggiran dapat mencakup memajukan kemakmuran ekonomi atau kemajuan pengaruh budaya dan ideologi suatu negara di luar negeri (Jackson & Sørensen, 2022). Konsep ini juga berkembang sebagai respons terhadap perubahan dalam sistem internasional, seperti pergeseran dinamika kekuatan global, kemajuan teknologi, dan perubahan politik dalam negeri (Rosenau, 2006; Goldstein & Pevehouse, 2020).

Tujuan kepentingan nasional memiliki banyak segi, mencakup pelestarian keamanan nasional, promosi pertumbuhan ekonomi, dan pemeliharaan atau perluasan pengaruh politik (Buzan, 2008). Keamanan nasional sering kali dipandang sebagai tujuan utama, karena hal ini menjamin kelangsungan hidup negara dalam

sistem internasional yang anarkis (Mearsheimer, 2003). Kepentingan ekonomi, termasuk perdagangan dan akuisisi sumber daya, juga menjadi pusat dari kepentingan nasional suatu negara (Keohane & Nye, 2012). Selain itu, negara sering kali mengejar tujuan untuk meningkatkan posisi global mereka melalui diplomasi, *soft power*, dan kerja sama internasional (Walt, 1990).

Fungsi kepentingan nasional adalah untuk memberikan kerangka kerja yang koheren untuk kebijakan luar negeri, memandu negara dalam menyeimbangkan politik kekuasaan dan diplomasi untuk mencapai tujuan mereka (Rosenau, 2006). Hal ini memungkinkan konsistensi dalam keputusan kebijakan luar negeri dan menawarkan alasan untuk terlibat dalam konflik atau kerja sama internasional (Waltz, 1979).

3. Metode Penelitian

Penelitian mengenai kerja sama internasional dalam membangun IKN ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku individual atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial dan manusia (Creswell, 2014). Dalam pendekatan kualitatif ini peneliti melakukan interpretasi dari apa yang dilihat, didengar dan dipahaminya. Lamont (2015) menyebut dengan penelitian kualitatif ini berarti peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang sifatnya non-numeric sekaligus memahami lebih baik lingkungan internasional dimana peristiwa itu terjadi.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara. Sedangkan data sekunder berupa dokumen dan informasi yang akan dikumpulkan dari

Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Data sekunder lainnya berasal dari lembaga penelitian, think-tank, situs media siber hasil survei, statistik, tabel, bagan dan arsip lainnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Dukungan internasional menjadi salah satu sumber bagi pembangunan IKN. Dukungan yang utama adalah terkait dengan dana dalam pengembangan IKN sekaligus juga terkait dengan karakter dari IKN yang disebut-sebut kebijakan ramah lingkungan dan penuh dengan teknologi modern. Gambaran ideal mengenai bagaimana bentuk IKN ini telah menjadi salah satu faktor yang mendorong keterlibatan internasional.

Dalam skema pendanaan yang termuat dalam Lampiran UU No 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa,

“skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan”.

Bentuk Kerjasama

Untuk membahas kerja sama internasional ini maka akan dianalisis tiga hal terkait keterlibatan internasional dalam pembangunan IKN mulai dari bentuk, fokus dan kepentingan. Dari sisi bentuk seperti halnya kerja samapada umumnya terdapat bentuk kerja sama bilateral dan multilateral. Dalam konteks bilateral lebih menekankan kerja samapemerintah Indonesia dengan

pemerintah asing, pemerintah Indonesia dengan badan usaha asing dan bisa pula Indonesia dengan lembaga keuangan internasional.

Dalam perkembangan pembangunan IKN setidaknya sejak UU IKN disahkan 2022 dan diperbarui Oktober 2023, Otorita IKN mencatat terdapat lebih dari 300 komitmen dari berbagai pihak dari luar negeri.

Besaran komitmen ini di satu sisi menunjukkan adanya mitra dari dunia internasional maupun lembaga keuangan internasional untuk melakukan investasi. Di sisi lain, meski sebagian besar masih bersifat komitmen memperlihatkan adanya kepercayaan dari dunia internasional.

Dalam sebuah penjelasan langsung oleh Presiden Joko Widodo 20 November 2023 dikatakan bahwa sampai tanggal tersebut sudah terdapat 300-an komitmen *Letter of Intent* (LOI) yang ditandatangani investor asing untuk berinvestasi di IKN Nusantara. (Detik.com, 20 November 2023) Jokowi mengatakan minat investasi di IKN masih sangat besar. Dia menyampaikan saat ini pengembangan IKN juga terus ditawarkan ke investor asing meski investor dalam negeri disebut menjadi prioritasnya.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN Agung Wicaksono selain Singapura investor asing juga datang dari Jepang, Malaysia, China, Korea. Namun demikian juga terdapat investor dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Timur Tengah (ikn.go.id, 2023).

Selanjutnya jelaskan bahwa dari 305 surat pernyataan minat (*Letter of Intent/LoI*) yang diterima Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), 172 LOI berasal dari investor domestik dan 133 LoI berasal dari pihak asing. Singapura menjadi negara asal investor dengan minat tertinggi dengan 27 LoI, disusul Jepang (25 LoI), Malaysia (19 LoI), China (19 LoI), Korea Selatan (9 LoI), Amerika Serikat (7 LoI), Finlandia (3 LoI), Spanyol (3 LoI), Uni

Emirat Arab (2 LoI), Thailand 2 (LoI), Jerman (2 LoI), dan negara lainnya (18 LoI) (Ferdiansyah, 2023).

Dari 305 surat tersebut, sebanyak 172 berasal dari investor domestik, sementara sisanya 133 merupakan investor asing. Dari ratusan investor asing itu, investor Singapura tercatat paling banyak menyatakan minat investasi di IKN yakni 27 investor.

Gambar 1. Investor IKN



Sumber: Kompas (2023).

Dengan penjelasan itu tampak bahwa kerja samabilateral masih menjadi salah satu sandaran dalam mengundang mitra asing. Setelah Singapura, investor asing yang juga berminat menanamkan modal di IKN yakni Jepang 25 investor, Malaysia 19 investor, China 19 investor, Korea Selatan 9 investor, Amerika Serikat (AS) 7 investor. Lalu, ada juga Finlandia 3 investor, Spanyol 3 investor, Uni Emirat Arab 2 investor, Thailand 2 investor, Jerman 2 investor, dan lain-lain 18 investor.

Dari berbagai ragam kerja samabilateral ini terdapat kerja samayang sifatnya antar pemerintah seperti yang terjadi dengan China misalnya karena sifat dari system politik negerinya. Sedangkan sebagian lagi kalau dilihat dari jumlah peminat per negara melibatkan investor swasta seperti tampak dari peminta Pembangunan IKN dari Jepang sebanyak 25 pelaku usaha. Malaysia juga tidak tergantung kepada investasi

pemerintahnya seperti tampak dalam jumlah yang berniat investasi di IKN yakni 19 pihak.

Bentuk kerja sama bilateral memainkan peran penting dalam menarik investasi asing ke IKN. Melalui kerja samaini, pemerintah Indonesia menjalin hubungan langsung dengan pemerintah asing, perusahaan swasta, dan berbagai entitas internasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya di IKN.

Salah satu contoh signifikan bentuk kerja sama adalah keterlibatan China, yang telah menunjukkan komitmen besar dalam proyek-proyek infrastruktur di IKN, termasuk pembangunan perumahan bagi aparat sipil negara dan fasilitas pertahanan. China, melalui CITIC Construction, telah menandatangani perjanjian untuk membangun 60 menara hunian dinas untuk aparat sipil negara dan pegawai Kementerian Pertahanan di IKN. Investasi ini mencerminkan bagian dari ambisi global China melalui inisiatif Belt and Road (BRI), yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara (Kompas, 2023; Mujiono, 2023).

Selain China, Jepang dan Singapura juga menunjukkan minat besar dalam pembangunan IKN, terutama di sektor infrastruktur dan teknologi. Jepang, sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek-proyek transportasi seperti MRT Jakarta. Pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan swastanya melihat IKN sebagai peluang strategis untuk memperluas portofolio investasi mereka di Indonesia. Sektor yang menjadi fokus utama Jepang adalah transportasi publik dan teknologi ramah lingkungan yang akan mendukung fungsi IKN sebagai kota pintar (The Jakarta Post, 2022).

Singapura, sebagai pusat keuangan dan teknologi di Asia Tenggara, juga sangat

tertarik untuk berinvestasi di sektor teknologi dan infrastruktur digital di IKN. Dengan pengalaman mereka dalam mengembangkan konsep *smart city*, Singapura siap berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di IKN, yang akan menjadi bagian penting dari sistem kota cerdas yang direncanakan pemerintah Indonesia (Bisnis Indonesia, 2023). Partisipasi Singapura tidak hanya dalam bentuk investasi finansial, tetapi juga melibatkan transfer pengetahuan dan teknologi, yang menjadi nilai tambah dalam kerja sama bilateral ini.

Selain bentuk kerja sama bilateral, peran lembaga keuangan multilateral dalam mendukung pembangunan IKN juga tidak kalah penting. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyatakan minat mereka untuk mendukung proyek ini melalui pendanaan dan bantuan teknis. Kedua lembaga ini memiliki pengalaman yang luas dalam mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, dan mereka melihat proyek IKN sebagai peluang untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Bank Dunia telah berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan dan teknis dalam pengembangan infrastruktur hijau di IKN. Dukungan ini mencakup pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi berkelanjutan, yang sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan berwawasan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pembiayaan IKN bisa dilakukan oleh World Bank dengan skema International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berpenghasilan menengah layak kredit (Amin, 2024).

Melalui skema pembiayaan hijau ini, Bank Dunia tidak hanya membantu mengurangi tekanan fiskal bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan IKN mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah diakui secara global.

ADB, di sisi lain, menawarkan skema pembiayaan yang mendukung proyek-proyek infrastruktur cerdas di IKN. Lembaga ini melihat IKN sebagai proyek penting dalam rangka pembangunan perkotaan yang modern dan berkelanjutan. Dalam berbagai publikasi resminya, ADB menyatakan bahwa dukungan mereka terhadap IKN tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga bantuan teknis dalam pengembangan sistem kota pintar dan ramah lingkungan (Asian Development Bank, 2022). Fokus ADB adalah memastikan bahwa pembangunan IKN sejalan dengan target-target pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh PBB, terutama dalam hal pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kerja sama multilateral ini memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan akses ke pendanaan jangka panjang dengan bunga rendah, yang sangat penting dalam mengurangi beban fiskal negara. Selain itu, keterlibatan lembaga multilateral ini juga memberikan legitimasi internasional terhadap proyek IKN, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing dari sektor swasta global.

Fokus Kerjasama

Selain bentuk kerjasama, dalam membangun IKN ini muncul pula fokus kerja samadari mitra dari Asia dan Eropa. Berdasarkan lampiran UU No 3 Tahun 2023 tentang IKN visi pembangunan IKN dilandaskan pada kerangka besar antara lain Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan. IKN nantinya digambarkan sebagai sebuah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna

dan memberikan layanan efektif melalui penggunaan air dan sumber daya energi yang efisien, pengolahan limbah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta lingkungan alami dan lingkungan terbangun yang sinergis. Lalu disebutkan juga bahwa kota IKN dilakukan dengan konsep kota hutan atau *forest city* guna memastikan ketahanan lingkungan dengan sekurang-kurangnya 50 persen industri hijau.

Dari paparan tersebut IKN menekankan kepada kota hijau, ramah lingkungan, berteknologi tinggi dengan karakter kota masa depan yang efektif dan efisien. Dengan karakter IKN tersebut maka dapat disebutkan bahwa mitra asing terutama dari Eropa menunjukkan minatnya dalam membangun kota modern dan ramah lingkungan. Istilah ramah lingkungan menjadi salah satu kata kunci dalam membangun IKN. Karakter yang dekat lingkungan dan modern ini juga digambarkan dalam berbagai penjelasannya termasuk di situs <https://www.ikn.go.id/>.

Oleh karena itulah maka fokus kerja samadari sejumlah mitra asing baik perusahaan swasta maupun pemerintah dan lembaga keuangan, merujuk kepada pembangunan berwawasan lingkungan. Dari Eropa, Finlandia telah menunjukkan minat dalam membangun kota ramah lingkungan. Wakil Menteri Keuangan Finlandia Ann-Mari Kemell mengatakan, konsep kota pintar (*smart city*) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik minat Finlandia untuk berinvestasi (Kompas, 2022). Minat Finlandia itu karena di negaranya terdapat model perkotaan urban yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni Helsinki, Espo, Vantaa, Turku, Tampere dan Oulu.

Sedangkan negara di Asia seperti China fokus kedalam pengembangan infrastruktur. China misalnya telah memperlihatkan minatnya untuk membangun infrastruktur pendukung seperti hotel dan

apartemen. Perusahaan dari China CITIC Construction dari Citic Group di sektor konstruksi akan membangun 60 tower hunian dinas untuk aparat di bidang pertahanan dan keamanan serta untuk aparat sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kompas, 2023).

China tertarik membangun infrastruktur Indonesia dibandingkan fokus kepada pembangunan kota berwawasan lingkungan. (Mujiono, 2023). Hal ini terkait dengan proyek China yang lebih luas yakni Belt and Road di Asia. Dengan kehadiran China dalam proyek infrastruktur tersebut maka dapat menjadi bagian menyambungkan daratan China dengan berbagai negara Asia dan Afrika.

Kepentingan dalam Kerjasama

Dalam mengkaji bagaimana kerja samainternasional dalam membangun IKN dapat dikaitkan juga dengan kepentingan nasional sebuah negara dan kepentingan bisnis yang terkait dengan perusahaan swasta atau lembaga keuangan. Jika kembali kepada kerangka kepentingan nasional sebuah negara maka kerja samadalam membangun IKN dengan Indonesia dapat diletakkan kepada faktor ekonomi dan politik.

Kepentingan ekonomi mitra asing sangat kuat dalam berpartisipasi membangun IKN. Negara-negara seperti Singapura akan lebih memperhatikan keuntungan yang diperoleh dengan membangun IKN. Hal itu disebabkan oleh aktifnya swasta dalam pengembangan bisnis di Indonesia.

Negara dari Asia lainnya yang kental kepentingan ekonomi adalah Jepang. Sebagai mitra dagang lima terbesar di Indonesia, Jepang tidak meninggalkan proyek pembangunan IKN yang juga merupakan agenda penting Indonesia. Jepang menilai keterlibatannya di IKN sangat kuat bermotifkan ekonomi. Hal ini tidak menyurutkan Jepang melakukan investasi

karena dalam kerja sama antar pemerintah Jepang telah terlibat dalam membangun kereta modern di dalam kota Jakarta yang disebut MRT (*Mass Rapid Transportation*).

Sementara itu, negara-negara dari Eropa seperti Jerman, Finlandia, Spanyol dan Norwegia lebih memandang kepada kepentingan politik untuk tetap hadir dalam membangun hubungan dengan Indonesia. Nilai proyek negara-negara Eropa untuk ikut dalam proyek IKN ini diperkirakan tidak lebih besar dari mitra Indonesia di Asia.

Kepentingan politik ini berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai sebuah negara besar di Asia Tenggara dan secara ekonomi memberikan dampak kepada kawasan Asia. Demikian juga pasar yang besar di Indonesia akan lebih menguntungkan dalam menjalin kerja sama sehingga dapat dipastikan hubungan politik tetap terjaga.

Kepentingan politik dalam kerangka diplomasi lebih merupakan diplomasi ekonomi yang ingin menunjukkan kepedulian dalam ikut membangun IKN. Hubungan politik ini penting dijaga terutama bagi negara-negara yang jauh lokasinya dari Indonesia karena bagaimanapun Indonesia masih memiliki posisi menentukan setidaknya di ASEAN dan Asia Tenggara bahkan Indonesia sudah menjadi anggota G-20.

Hal ini juga terjadi saat kerja sama Indonesia dengan Inggris. Kepentingan nasional sebuah negara melalui sebuah kerja sama peningkatan pertahanan dan keamanan siber dengan Inggris misalnya, terbukti mencari kepentingan lainnya di Indonesia untuk manfaat Inggris (Weu, M. R., 2020).

Sebenarnya mitra dari Asia baik Singapura, China atau Jepang juga sangat kuat kepentingan politiknya dengan Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu keterlibatan dengan membangun IKN yang sudah diputuskan sejak 2022 ini merupakan sebuah isyarat perhatian yang selanjutnya dapat bermanfaat. Ketika membuka kerja

sama lainnya tidak hanya di IKN tetapi di seluruh Indonesia.

5. Kesimpulan

Indonesia telah memberikan ruang bagi kerja sama internasional dalam membangun IKN bagi negara dan institusi dari Asia dan Eropa. Ruang bagi masuknya asing itu dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2023 tentang IKN. Kerja sama itu bisa bersifat bilateral maupun multilateral dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun mendatang.

Dari sisi bentuk kerja sama internasional dengan Asia dan Eropa mengikuti pola yang ada berupa kerja sama bilateral dan multilateral. Sebagian besar kerja sama Indonesia dengan mitra asing dilakukan melalui bentuk bilateral baik dengan pemerintah, swasta atau lembaga keuangan internasional. Kerja sama bilateral dilakukan melalui proses negosiasi dengan mitra. Namun demikian sejauh ini bentuk kerja sama ini pada tahap *letter of intent* belum pada investasi yang riil.

Sedangkan, fokus kerja sama internasional mulai dari infrastruktur utama dan pendukung sampai bidang lingkungan dan teknologi. Negara-negara Eropa seperti Finlandia dan Norwegia menunjukkan minat membangun kota ramah lingkungan karena mengklaim telah memiliki contoh di negaranya. Sedangkan dari Asia seperti China misalnya mempunyai komitmen membangun bangunan dan jalan yang tidak lain infrastruktur yang juga penting di IKN.

Terkait kepentingan nasional dalam kerja sama di IKN ini masing-masing negara memiliki pertimbangan. Sedikitnya terdapat dua perspektif untuk melihat keterlibatan dan komitmen asing dalam membangun IKN. Aspek ekonomi masih menjadi kepentingan dominan keterlibatan asing dalam membangun IKN. Sisi keuntungan dalam kerjasama di IKN

menjadi pertimbangan penting agar dapat memperoleh nilai ekonomi.

Selain kepentingan ekonomi, ada juga negara-negara yang memiliki kepentingan politik dalam ikut serta membangun IKN. Meskipun tidak diungkapkan dalam komitmen membangun IKN, namun kalau dipandang secara luas kehadiran negara asing dari Asia dan Eropa dalam membangun IKN memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan politik kedua negara atau lembaga. Dengan adanya keterlibatan di IKN, sejumlah negara mendapatkan keuntungan dalam mengembangkan kegiatan ekonominya.

Studi ini memperkaya kajian mengenai pola dan modalitas kerja sama internasional di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini menawarkan wawasan komprehensif tentang motivasi strategis mitra internasional Indonesia, mencakup aspek ekonomi, politik, dan teknologi, yang mendorong keterlibatan mereka dalam proyek tersebut. Dengan menganalisis kepentingan berbagai aktor global, studi ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam terkait dinamika diplomasi untuk kerja sama internasional oleh Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti menyampaikan terimakasih atas bantuan penelitian dari Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Ma'mun Murod dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. 2017. *The Globalization Of World Politics: An Introduction To International Relations*

(7th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Boeije, Hennie. 2010. *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.

Buzan, B. 2008. *People, states, and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era*. London: ECPR Press.

Creswell, John. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff Jr, R. L. 2019. *Contending Theories Of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Routledge.

Goldstein, J. S., Pevehouse, J. C., & Cook, T. E. 2020. *International relations* (11th ed.). New York: Pearson.

Held, D. 2019. *Global Governance and Cosmopolitan Citizens*. New York: Polity Press.

Holsti, K. J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. New York: Prentice Hall.

Jackson, R., & Sørensen, G. 2022. *Introduction to international relations: Theories and approaches*. Oxford: Oxford University Press.

Kartasasmita, K. 1997. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Administrasi Bandung.

Keohane, R., & Nye, J. 2012. *Power and interdependence*. New York: Longman.

Lamont, Christopher. 2014. *Research Methods in International Relations*. London: Sage.

Mearsheimer, J. 2003. *The tragedy of great power politics*. New York: W.W. Norton & Company.

Morgenthau, H. 1973. *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York: McGraw-Hill Education.

- Nye, J. 2003. *Understanding international conflicts: An introduction to theory and history*. New York: Pearson.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. (2019). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Remadja Rosda Karya.
- Rana, Kishan S. 2011. *21st Century Diplomacy: A Practitioner's Guide* (Key Studies in Diplomacy). London: Continuum.
- Rosenau, J. 2006. *The study of world politics*. Abingdon: Routledge.
- Rossmann, V. 2018. *Capital Cities: Varieties and Patterns Of Development And Relocation*. London: Taylor & Francis.
- Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Walt, S. 1990. *The origins of alliances*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Waltz, K. 1979. *Theory of international politics*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Acuan artikel dalam jurnal:**
- Adinugroho, A. 2021. "The Role of International Partnerships in Indonesia's Capital City Relocation", dalam *Journal of International Relations and Development*, 24(2), 197-210.
- Editha, P., Firre An, S., Yusuf, A., Surachman, S., & Rui, D. 2023. "Nusantara Capital City (Ikn): Threats and Defense Strategies For Indonesia's New Capital", dalam *Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(1), 21-34.
- Larso, Dwi. 2022. "Indonesia's Capital City Relocation and the Potential for South-South Cooperation", dalam *Journal of South Asian Studies*, 2022, vol. 45, no. 1, pp. 56-68.
- Mujiono, D. I. K., & Sagena, U. W. 2020. "Opportunities of international cooperation in relocating the new capital of Indonesia", dalam *Interdependence Journal of International Studies*, 1(1), 13-22.
- Mujiono, Dadang Ilham Kurniawan, Universitas Mulawarman.
- Prasetijo, Adi. 2021. "The Role of International Financial Institutions in Indonesia's Capital City Relocation", dalam *Journal of Development Studies*, 2021, vol. 57, no. 5, pp. 877-891
- Sari, Dian Permata. 2021. "The Role of International Collaboration in Indonesia's Capital City Relocation: Challenges and Opportunities", dalam *International Journal of Urban and Regional Research*, 2021, vol. 45, no. 5, pp. 932-946.
- Sumantri, S. H. 2022. "Analyzing Defense and National Security Aspects from The Republic of Indonesia's Prospective New Capital City", dalam *Croatian International Relations Review*, 28(89), 246-258.
- Weu, M. R. 2020. "Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Dalam Bidang Keamanan Siber", dalam *Global Political Studies Journal*, 4(2), 154-169. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5879>.
- Acuan dari prosiding:**
- Kapiarsa, A. B., Kurniawan, F., Ali, Y., & Supriyatno, M. 2020. "The Safe Indonesian Capital from The Defense Geography Perspective (Study Case: Kutai Kartanegara & Penajam Paser Utara Regency, East Borneo Province)", In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 409, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.
- Mubaroq, M. R., & Solikin, A. 2019. "Review on the financing scheme of Indonesia's Capital City relocation plan: Lessons learned from Brazil, Malaysia, and

Tanzania”. [books.google.com.
https://doi.org/10.4108/eai.12-11-
2018.2288767](https://books.google.com/https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288767).

Rachmawati, R., Haryono, E., Ghiffari, R. A., Reinhart, H., Permatasari, F. D., & Rohmah, A. A. 2021. “Best practices of capital city relocation in various countries: literature review”, In E3S Web of Conferences (Vol. 325, p. 07004). EDP Sciences.

Acuan artikel dalam website:

Amin, Irfan. 25 Juli 2024. “Delegasi Bank Dunia Temui Jokowi Bahas Pembiayaan IKN”, dalam <https://tirto.id/delegasi-bank-dunia-temui-jokowi-bahas-pembiayaan-ikn-g12e>.

Farisa, Fitria Chusna. 15 Maret 2022. “Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen Diambil dari APBN”, dalam Kompas.com : <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/08563911/jokowi-pembangunan-ikn-butuh-rp-466-triliun-20-persen-diambil-dari-apbn>.

Ferdiansyah, Benardy. 20 November 2023. “OIKN ungkap menerima 305 surat pernyataan minat berinvestasi di IKN”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/3831465/oikn-ungkap-menerima-305-surat-pernyataan-minat-berinvestasi-di-ikn>.

IKN. 20 November 2023. “Tak Hanya Investor Dalam Negeri, Ibu Kota Nusantara Juga Gaet Investor Luar Negeri”, dalam <https://www.ikn.go.id/tak-hanya-investor-dalam-negeri-ibu-kota-nusantara-juga-gaet-investor-luar-negeri>.

Nugraheny, Dian Erika & Santosa, Bagus. 25 Mei 2022. “Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/14243161/finlandia-tertarik-kerja-sama-dengan-indonesia-bangun-ikn-ramah-lingkungan>.

05/24/14243161/finlandia-tertarik-kerja-sama-dengan-indonesia-bangun-ikn-ramah-lingkungan.

Safitri, Eva. 20 November 2023. “Jokowi Sebut Ratusan Investor Asing Teken LoI soal IKN: Yang Real Mulai Belum”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-7046021/jokowi-sebut-ratusan-investor-asing-teken-loi-soal-ikn-yang-real-mulai-belum>.

Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi:

Bin, R., & Jamil, M. N. S. B. 2022. “Relocation Of Capital and The Implication To Malaysia-Indonesia Bilateral Relations”.